

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BONTANG
TAHUN 2020**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi

publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 7 Seri E)
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

C. TUJUAN

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan public serta para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;

3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public dengan pengguna pelayanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan public;

BAB II

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID-PEMBANTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BONTANG

A. Pengertian

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

B. Tugas Dan Tanggungjawab PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah

mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan.

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

C. Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi public, langkah awal yang harus dipenuhi adalah, sebuah pedoman, standar operasional prosedur, antara lain sebagai berikut:

Tabel : 2.1

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DPMPTSP TAHUN 2020

NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4	Buku Registrasi	√	
5	Form.Permohonan Informasi Publik	√	
6	Form.Permohonan Keberatan	√	
7	Form.Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	
8	Form.Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	√	
9	Meja pelayanan informasi	√	
10	Informasi public melalui Weeb	√	
11	Petugas Front desk (Layanan PPID)	√	

C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

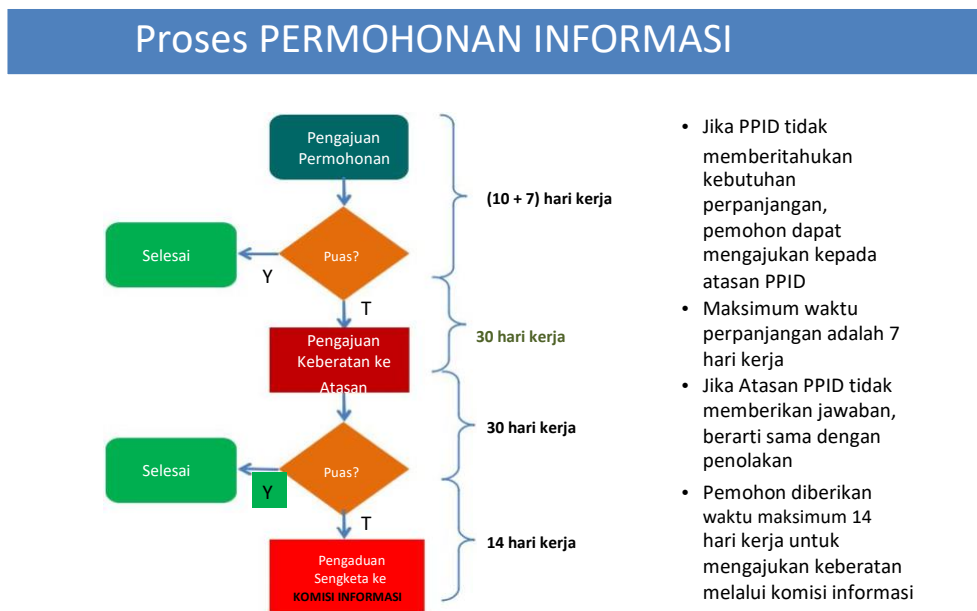
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

D. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;

4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Gambar :2.1
Proses Permohonan Informasi



E. Jumlah Permohonan Informasi

Jumlah permohonan informasi selama Tahun 2020 ini berjumlah hanya 4 saja karena dalam masa pandemi covid 19.

Tabel : 2.2

**PERMINTAAN/PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BONTANG
TAHUN 2020**

NO	PEMOHON		JUMLAH PERTA NYAAN	PELAYANAN		
	KELOMPOK	JUMLAH		SELESAI	MEDIASI	AJUDIKASI
1	Masyarakat/perorangan	1	1	1		
2	LSM	1	1	1		
3	Sekolah					
4	Perguruan Tinggi					
5	Lembaga Penelitian					
6	Lain-lain	2	2	2		
	JUMLAH	4	4	4		

Tabel 2.3
Permintaan Penelusuran Informasi berdasarkan Status Tahun 2020

No	STATUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JML
1	DOSEN													
2	GURU													
3	MAHASISWA													
4	PELAJAR													
5	PNS/PSW	1												1
6	TNI/POLRI													
7	UMUM	1		2										3
	JUMLAH	2		2										4

Tabel.2.4
Permintaan berdasarkan Penggunaan tahun 2020

B	PENGGUNAAN HASIL PENELUSURAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JML
1	PENDIDIKAN													
2	PENELITIAN	1												1
3	PENGABDIAN MASYARAKAT			3										3
	JUMLAH	1		3										4

Tabel :2.5

**PERMINTAAN /PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG
(lewat website dan datang ke desk layanan) Tahun 2020**

NO	BULAN	PERMINTAAN INFORMASI	PERMOHONAN INFORMASI	STATUS			WAKTU		KETERANGAN
				Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	2	2	2			16/01/2020 27/01/2020	19/01/2020 30/01/2020	
2	FEBRUARI								
3	MARET	2	2	2			11/03/2020 15/03/2020	11/03/2020 15/03/2020	
4	APRIL								
5	MEI								
6	JUNI								
7	JULI								
8	AGUSTUS								
9	SEPTEMBER								
10	OKTOBER								
11	NOVEMBER								
12	DESEMBER								
	JUMLAH	4	4	4					

F. Analisa data layanan informasi publik

1. Bahwa permintaan layanan informasi public dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, dapat kami kemukakan bahwa Sekolah sebesar 0% permintaan atau setara dengan 0 %, kemudian untuk Perguruan tinggi sebanyak 1 permintaan atau setara dengan 25 %, masyarakat umum sebanyak 2 permintaan atau setara dengan 50 %,lain-lain yang mengakomodir TNI/Polri dan PNS/PSW sebanyak 1 permintaan atau setara dengan 25 %.
2. Bahwa permintaan berdasarkan status dapat kami kemukakan sebagai berikut : Pelajar sebanyak 1 permintaan atau setara dengan 25 %, masyarakat umum sebanyak 2 atau setara dengan 50 %, mahasiswa sebanyak 0 dan PNS/PSW sebanyak 1 % permintaan atau setara dengan 25 %,guru sebanyak % permintaan atau setara dengan 0%,dosen sebanyak 0% permintaan atau setara dengan 0 % dan terakhir TNI/POLRI sebanyak 0% permintaan atau setara dengan 0%.

3. Bahwa permintaan berdasarkan penggunaan dapat kami kemukaan sebagai berikut: pendidikan sebanyak 1 % permintaan atau setara dengan 25 %, penggunaan sebagai penelitian sebanyak 1 atau setara dengan 25 %, dan yang terakhir penggunaan untuk pengabdian masyarakat sebanyak 2 atau setara dengan 50 %.
4. Daftar informasi publik (DIP) untuk tahun 2020 sebanyak 4 informasi yang terdiri dari informasi yang tersedia **setiap saat** sebanyak 1 atau setara dengan 25 %, informasi yang tersedia **serta merta** sebanyak 2 atau setara dengan 50 %, dan informasi yang tersedia **berkala** sebanyak 1 atau setara dengan 25 %.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID-Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Saat Pandemi Covid 19 ini, banyak bermunculan hoax atau pemberitaan yang tidak sesuai maka dibutuhkan pemberitaan yang berimbang dengan tetap mencari sumber berita yang tepat;
2. Memberikan serta menyebarkan informasi, kebijakan Pemerintah dan Tips – tips bermanfaat terkait pencegahan covid 19 terutama 3 M, Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan.

Pandemi Covid 19 ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan informasi baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

B. Saran-saran

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. PPID Pembantu DPMTSP tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab meski didalam masa pandemic dengan tetap menyebarluaskan informasi, kebijakan Pemerintah serta tips – tips terkait Covid 19 sesuai dengan ketentuan dan sumber yang terpercaya;
2. Berkolaborasi dengan OPD Terkait sesuai dengan peruntukan informasi untuk di berikan kepada Masyarakat dan Tetap memanfaatkan media social untuk layanan informasi public.

Mengetahui,
Plt. Kepala DPMTSP

Drs. H. Zulkarnain, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196408082000031003

Bontang, 04 Januari 2021

Pembuat Laporan,

Maulina Noor, A.Md. Par
Penata Muda (III/a)
NIP. 198708202010012016

LAMPIRAN LAPORAN PPID - PEMBANTU

Kegiatan Visitasi PPID Utama Ke PPID Pembantu DPMPTSP,

- I. Hari/Tanggal : Rabu, 01 Juli 2020
Waktu : 10.30 wita s/d selesai
Tempat : Lounge DPMPTSP



Buku Permohonan Informasi dan Dokumentasi
 (Tertulis atau Tidak Tertulis)
 Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi / PPID Pembantu
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Bontang

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KANTOR	NOMOR TELEPON / HP	ALAMAT EMAIL	JENIS INFORMASI DAN YANG DOKUMENTASI DIBUTUHKAN	MAKSUD DAN TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI DAN DOKUMENTASI	PERMINTAAN TERTULIS ATAU TIDAK	NAMA PETUGAS PPID	KET
28	Tania		31 Komplek Bude Post Patulaha	08006699391	vanabisa@gmail.com	update data dan info perusahaan	bermencari data		tertulis	Maulina	14/01/2020
29	ALIKRA - P Alana Kusumawati Sungai Bontang	-	28 Ahmad Yani Komplek Blok 3202 Blok A No 4 Kelurahan Arah-kembang Bontang Utara	-	-	Pembelian Salinan Surat Din Penerapan Misk PT KIE Bontang	Pemutakhiran data		tertulis	Maulina	14/01/2020
30	Achmad	-	28 Sultan Syahrir RT 02 no Bala-Bah 9	08215043199	-	Pencetakan Permisian dan Salinan IMB Wilayah Kelangka	Pemutakhiran data karena merasa terganggu dengan Altitas dan karakteristik bangunan baru		tidak tertulis	Maulina	14/01/2020
31	Muhajir Bas	-	Melaka Gembak	-	Melaka Bas	Dasar hukum lain tidak Bermanfaat Ruang	Pemutakhiran data izin belajar Perumahan Pangs		tertulis	Maulina	14/01/2020

